

PERAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILU DI INDONESIA

Ahmad Sampurna¹, Sri Widya Ningsih², Try Akhmal Hidayat³, Zhafran Nuraldy⁴
ahmadsampurna@uinsu.ac.id¹, sriwidyaningsih4831@gmail.com², tryakhmalmetal@gmail.com³,
aldyzafran2019@gmail.com⁴

Universitas islam negeri sumatera utara

ABSTRAK

Keberadaan partai politik di Indonesia merupakan sebuah bentuk kelembagaan yang memiliki peran sangat penting dalam mempengaruhi sistem perpolitikan di Indonesia. Partai politik yang baik adalah partai yang dapat mengimplementasikan nilai-nilai Demokrasi dan Pancasila dalam menentukan sebuah kebijakannya, serta yang dapat menjadi wakil rakyat dalam menyalurkan aspirasi yang ada. Tetapi saat ini, dengan beragamnya partai-partai politik yang ada belum sepenuhnya peran tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana peran partai politik dalam pemilu Indonesia telah terlaksanakan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan sebuah metode untuk menghasilkan data berbentuk deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa partai politik di Indonesia belum sepenuhnya menjalankan perannya dengan baik. Penerapan nilai-nilai demokrasi dan pancasila dalam berpolitik kerap kali masih belum sepenuhnya dijalankan sehingga pemilu di Indonesia dapat dikatakan kurang terlaksanakan secara maksimal.

Kata Kunci: Partai, Politik, Pemilu, Demokrasi.

Abstract

The existence of political parties in Indonesia is an institutional form that has a very important role in influencing the political system in Indonesia. A good political party is a party that can implement the values of Democracy and Pancasila in determining a policy, and that can be a representative of the people in channeling their aspirations. But currently, with the variety of political parties that exist, these roles have not been fully implemented. Therefore, this research aims to examine the extent to which the role of political parties in Indonesian elections has been well implemented. This research uses a qualitative research method which is a method to produce descriptive data. The results of this study say that political parties in Indonesia have not fully carried out their role well. The application of the values of democracy and Pancasila in politics is often still not fully implemented so that elections in Indonesia can be said to be less than optimal.

Keywords: Party, Politic, Elections, Democracy.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi. Salah satu wujud dari penyelenggaraan demokrasi adalah dengan pemilihan umum. Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan karena melalui pemilihan umum rakyat bisa memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan.

Nilai-nilai demokrasi dalam pemilu tidak hanya dapat dilakukan oleh masyarakat di sebuah negara, melainkan sebuah aktor negara melalui berbagai partai politik yang ada di Indonesia dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang tercantum sebagai pedoman negara seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan partai politik di Indonesia merupakan sebuah bentuk kelembagaan yang memiliki peran yang penting dalam melakukan intervensi pemerintah. Dikarenakan dengan adanya kehadiran partai politik di

Indonesia, partai politik dapat menjadi sebuah bentuk upaya dalam mempengaruhi pemerintah dalam membentuk budaya atau sikap. Dan keberadaan partai politik dapat menjadi semakin efektif apabila partai politik dapat membentuk saluran kelembagaan yang digunakan untuk menampung berbagai partisipasi politik dan partisipasi politik yang terkumpul dapat diserahkan kepada pemerintah agar dapat diatasi dan dikelola dengan baik dan benar. Sebuah partai politik yang terbentuk di Indonesia merupakan sebuah partai politik yang lahir berdasarkan pada ideologi yang dianut oleh partai tersebut. Dan sebuah ideologi yang dianut menjadi sebuah identitas partai (Romli, 2011).

Dikarenakan Indonesia merupakan sebuah negara dengan menerapkan sistem demokratis, hal ini memberikan perubahan yang terjadi di dalam sebuah dinamika kehidupan politik dengan membentuk Partai Politik berdasarkan masing-masing ideologi yang dibentuk. Perbedaan ini yakni seperti perbedaan antara partai politik yang berideologi Pancasila dengan partai politik yang berideologi berlandaskan Islam. Perbedaannya adalah ideologi Islam merupakan sebuah ideologi yang diterapkan oleh Partai-partai Islam, yang mana pada partai ini adanya konsep islam yang diimplementasikan yakni amar ma'ruf nahi munkar dan rahmatan lil alamiin. Sedangkan pada Partai Politik yang berlandaskan pada ideologi Pancasila, yakni mengedepankan nasionalisme sebagai ideologi dengan tidak membedakan keberagaman yang ada di Indonesia seperti ras, bangsa, suku, jenis kelamin, agama, profesi, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ataupun memiliki pendirian bahwa sebuah rasa nasionalisme di Indonesia dapat memiliki keterkaitan dengan wawasan kebangsaan untuk terus memiliki rasa berbangsa dan bernegara yang harus terus dilestarikan (Romli, 2011).

Adanya identitas partai yang dimiliki sebuah partai politik dapat menjadi sebuah dasar dalam mencapai cita-cita maupun perjuangan yang ingin dicapai oleh partai politik dan dengan adanya ideologi yang dianut oleh masing-masing partai politik ideologi ini dapat menjadi sebuah aspek dalam melakukan intervensi terhadap pemerintah dengan memberikan perspektif yang dimiliki untuk dapat dilakukan oleh Pemerintah, khususnya untuk dapat menciptakan proses pemilihan umum di Indonesia dengan baik. Oleh karena itu, dengan adanya kondisi partai politik di Indonesia yang beragam serta memiliki ideologi yang bervariasi baik itu menganut ideologi Pancasila maupun Islam, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masing-masing Partai Politik di Indonesia harus terus membentuk tujuan nasional negara dan mengupayakan untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi di Indonesia secara baik dan benar.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif yang merupakan sebuah prosedur untuk menghasilkan data berbentuk deskriptif. Dengan menggunakan penelitian kualitatif ini, peneliti mencoba untuk menghasilkan uraian yang mendalam terkait ucapan, tulisan, hingga sebuah perilaku yang diamati baik dari kelompok, individu, hingga kelompok masyarakat dalam penulisan artikel ini. Dengan menggunakan penelitian kualitatif ini pula, penulis dapat menguraikan data dalam bentuk deskriptif dan jawaban dari sebuah penelitian dapat terjadi dan dianalisis dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Teori

1. Partai Politik

Menurut Budiardjo partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan

kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sedangkan menurut Giovanni Sartori partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik.

Berdasarkan dua definisi para ilmuwan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Beberapa perangkat yang melekat pada partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisasi.
2. Partai politik bertujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
3. Untuk merealisasikan tujuan dari partai politik, harus memperoleh dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat melalui pemilihan umum
4. Partai politik memiliki prinsip-prinsip yang telah disetujui bersama antar anggota partai politik.

Adapun beberapa contoh partai politik yang ada di Indonesia, seperti NasDem (Partai Nasional Demokrat), PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), PSI (Partai Solidaritas Indonesia), Partai Demokrat, Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat), PAN (Partai Amanat Nasional), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Gerindra (Partai Gerakan Indonesia Raya), Golkar (Partai Golongan Karya), Perindo (Partai Persatuan Indonesia), PKS (Partai Keadilan Sejahtera), dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

2. Pemilu (Pemilihan Umum)

Menurut Indria Samego pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial antara peserta pemilihan umum (partai politik), dan calon kepala daerah dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televise) serta media lainnya seperti spanduk, selebaran, bahkan komunikasi antar pribadi yang berbetuk face to face (tatap muka) atau loby yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi, serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.

Sistem Pemilu di Indonesia

Sistem pemilu Indonesia dari masa ke masa dalam sejarah pemilu di Indonesia hanya terdapat 2 sistem yang diterapkan. Kedua sistem itu adalah proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Sistem proporsional tertutup membuat rakyat sebagai pemilih hanya bisa memilih partai politik. Pemilih tidak bisa mengetahui dan tidak bisa memilih secara langsung calon anggota legislatif (Caleg) terpilih yang bakal menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan sistem ini, walaupun pemilih yang memberikan suara kepada salah satu calon, maka suara tersebut menjadi suara partai politik pengusung. Suara partai politik yang telah mencapai ambang batas kursi akan diberikan kepada para calon yang diusung berdasarkan nomor urut.

Dalam sistem proporsional tertutup, partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut. Nomor urut itu nantinya ditentukan oleh partai politik. Sementara, penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut. Apabila partai mendapatkan dua kursi, maka calon terpilih adalah nomor urut 1 dan 2. Karena rakyat tidak bisa memilih langsung wakil-wakilnya yang duduk di kursi legislatif, maka sistem proporsional tertutup ini disebut kurang demokratis.

a. Pemilu 1995

Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dan

diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

b. Pemilu Orde Baru

- 1 Pemilu 1971. Pemilihan Umum pertama sejak orde baru atau Pemilu kedua sejak Indonesia merdeka, yakni Pemilu 1971 diikuti oleh 10 Organisasi Peserta Pemilu (OPP), yakni 9 partai politik dan satu Golongan Karya.
- 2 Pemilu 1977. Pemilu ini diselenggarakan pada tanggal 3 Mei 1977 dengan diikuti oleh 3 Organisasi Peserta Pemilu (OPP), yakni dua Partai Politik dan satu Golongan Karya.
- 3 Pemilu 1982. Indonesia menyelenggarakan pemilu yang keempat pada tanggal 4 Mei 1982.
- 4 Pemilu 1987. Indonesia menyelenggarakan pemilu yang kelima tahun 1987. Pemungutan suara pemilu 1987 secara serentak dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987.
- 5 Pemilu 1992. Pada tahun 1992 diselenggarakan pemilu keenam di Indonesia berdasarkan payung hukum yang sama dengan payung hukum pemilu sebelumnya. Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992
- 6 Pemilu 1997

c. Pemilu Era Reformasi

Pasca jatuhnya pemerintahan Orde Baru tahun, 21 Mei 1998, rakyat Indonesia telah menyelenggarakan tiga kali Pemilu, yakni Pemilu 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Peran Partai Politik dalam Pemilu di Indonesia

Partai politik merupakan sebuah organisasi yang memiliki peran penting dalam memberikan pengaruh baik terhadap peningkatan kualitas partisipasi politik rakyat di sebuah negara. Akan tetapi, partai politik yang seharusnya dapat menjadi acuan rakyat untuk dapat berpartisipasi baik di dalam kancah politik dan turut serta mengambil keputusan dengan baik dalam memiliki kandidat pemimpin, saat ini perannya terlihat belum dapat terimplementasikan dengan maksimal dikarenakan adanya berbagai permasalahan yang kerap kali dihadapi oleh masing-masing partai politik seperti adanya politik uang dan korupsi yang dilakukan oleh partai politik Indonesia (Wahyuningroem, 2021).

Peran partai politik di antaranya adalah sebagai sarana sosialisasi politik yang merupakan sebuah proses untuk dapat membentuk orientasi politik dan sikap para anggota masyarakat, sebagai sarana komunikasi politik yang dapat menjadi proses penyampaian informasi terkait politik yang berasal dari pemerintah kepada masyarakat atau sebaliknya, sebagai sarana rekrutmen politik yang merupakan adanya sekelompok orang untuk dapat melaksanakan sejumlah peran yang terdapat pada sistem politik. Partai politik juga dapat memainkan peran sebagai pengelola konflik, dikarenakan partai politik memiliki kemampuan untuk dapat mengendalikan berbagai konflik yang muncul baik itu melalui aktivitas dialog terhadap pihak yang sedang berkonflik, menampung berbagai aspirasi dan kepentingan yang berasal dari pihak-pihak berkonflik, sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan untuk dapat menyalurkan kepentingan yang terdapat pada masyarakat.

Sebuah bentuk kepemimpinan yang baik adalah sebuah kepemimpinan yang dapat mencapai kepentingan bersama di sebuah negara dan yang dapat mengedepankan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi. Sebuah kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila perlu untuk melibatkan warga negara dalam menentukan sebuah kebijakan secara adil, jujur dan terbuka agar tujuan nasional pembangunan bisa tercapai. Dengan adanya keterlibatan warga negara dalam merumuskan proses kebijakan, hal ini juga dapat dipastikan bahwa keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin negara tidak merugikan rakyat dikarenakan sebuah pembangunan yang dilakukan. Hal ini merupakan proses dalam mencapai kemakmuran rakyat (Pusdatin, 2021). Selain itu, sebuah kepemimpinan harus menanamkan pada nilai ketuhanan, nilai persatuan, nilai kemanusiaan, dan nilai keadilan, dengan memastikan tidak ada kelompok yang tertindas dan dirugikan, tanpa memihak siapapun dan dapat mencapai tujuan bersama.

Demokrasi merupakan sebuah bentuk yang dijalankan oleh sistem pemerintahan sebuah negara untuk mengupayakan terwujudnya kedaulatan rakyat maupun negara. Dalam mengimplementasikan sebuah sistem demokrasi oleh sebuah negara, aktor negara yakni pemerintah dapat terus memastikan bahwa sistem demokrasi yang dilakukan telah meliputi berbagai aspek di sebuah negara di antaranya adalah aspek ekonomi, sosial, politik, hingga budaya dengan dapat memberikan sebuah praktik dalam melakukan kebebasan secara politik yang setara, bebas, dan terbuka. Demokrasi sangat melarang adanya tindakan politik uang ataupun korupsi dikarenakan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi senantiasa terus mengedepankan kejujuran dan keadilan sosial yang terbentuk di dalam tatanan masyarakat. Dan dengan tingginya berbagai bentuk tindakan asusila yang dilakukan di dunia perpolitikan saat ini, hal ini seharusnya dapat menjadi sebuah peran partai politik untuk dapat mencegah tindakan menyimpang terjadi.

Partai politik seharusnya memiliki kemampuan untuk dapat menjadi seorang mediator antara keinginan masyarakat dan kebutuhan serta responsivitas dari pemerintah untuk dapat mendengar tuntutan rakyat (Ashari, 2020). Oleh karena itu, dengan adanya peran yang dimiliki oleh partai politik, peran-peran tersebut dapat menjadi upaya yang dilakukan oleh partai politik untuk melakukan intervensi terhadap pemerintah dikarenakan partai politik dapat memaksimalkan perannya untuk mewakili kepentingan rakyat untuk dapat diserahkan kepada pemerintah dan memastikan bahwa intervensi yang dilakukan dapat berkontribusi baik terhadap seluruh kehidupan bangsa dan negara.

KESIMPULAN

Partai politik memegang peranan penting dalam pemilu di Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola sistem pemilihan, yang meliputi perencanaan program dan anggaran, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Selain itu, partai politik juga bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.

Eksistensi dan efektivitas partai politik sangat menentukan pengaruh yang mereka hasilkan dalam negara. Saat ini, partai politik kurang menjalankan perannya dengan baik dan benar. Padahal seharusnya ketika mereka telah menjadi perwakilan rakyat ataupun perwakilan aspirasi rakyat, mereka harus benar-benar menjalankan peran mereka dengan baik. Masyarakat sebagai pemilih seharusnya juga bisa lebih bijak dalam memilih siapa yang pantas untuk dijadikan wakil rakyat dan duduk di kursi pemerintahan. Masyarakat

harus bisa memilih wakil yang jujur, adil dan terbuka agar kehidupan di Indonesia bisa lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, E. T. (2020). *Formulasi Hubungan Birokrasi Pemerintah Dengan Partai Politik Dalam Konters Good Local Governance*.
- Gusva, Gova Rianda. *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Universitas Eka Sakti
- Gymnastiar, Deri. (2022). *Peran Partai Politik dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol. 7. No. 3.
- Romli, L. (2011, November). *Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia*.
- Wahyuningroem, S. L. (2021). *Masalah-masalah Partai Politik Indonesia*.